

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Identifikasi Masalah

Sejumlah negara, termasuk Indonesia pada saat ini masih berjuang melawan kemiskinan sebagai isu sosial dan ekonomi. Sebagai salah satu negara yang berkomitmen terhadap SDGs, Indonesia terus berjuang mengatasi tantangan kemiskinan yang kompleks, dengan tujuan mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat pada tahun 2030. Di antara 17 SDGs, yang menjadi fokus utama adalah pengentasan kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia merupakan isu yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik. Tingkat kemiskinan menunjukkan fluktuasi yang tergolong besar selama beberapa tahun belakangan. Fenomena ini adalah bentuk interaksi dari berbagai faktor internal dan eksternal yang kompleks. Pada periode 2013 hingga 2019, Indonesia mengalami penurunan tingkat kemiskinan yang stabil, dari sekitar 11,37% pada 2013 menjadi 9,22% pada September 2019. Pada periode 2001 hingga 2018, terdapat tren penurunan rata-rata 0,5% per tahun pada persentase penduduk miskin. Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan global menunjukkan penurunan sekitar 720 juta jiwa per tahun. Namun, tantangan masih tetap ada, terutama dengan tingginya indeks kesenjangan dan keparahan kemiskinan.

Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia berada pada angka 9,63 persen. Persentase ini masih jauh dari sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yaitu sebesar 6,5 hingga 7,5 persen. Pada tahun 2020 orang yang hidup di bawah garis kemiskinan berjumlah hampir 28 juta orang, yang sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik penting seperti pendidikan dan kesehatan. Konsep kemiskinan dapat dilihat melalui berbagai cara, tergantung pada seberapa sering digunakan. Secara umum, rendahnya pendapatan per

kapita, sumber daya manusia yang tidak memadai, tingkat pendidikan yang rendah, terbatasnya lahan, kurangnya modal, dan pelayanan kesehatan yang buruk adalah semua tanda kemiskinan. Saat ini, kemiskinan menjadi landasan bagi pemerintah dan berbagai daerah untuk terus mencari cara untuk mengakhiri kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan seyogyanya bersifat menyeluruh, melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terintegrasi dan inklusif di seluruh wilayah.

Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pemerintah telah menetapkan target ambisius untuk menurunkan tingkat kemiskinan hingga 7% pada tahun 2024. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan akhir pembangunan. Halim (2020) merujuk pada pandangan Jhingan (2008) yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan dapat dinilai melalui sejumlah indikator, termasuk pendapatan per kapita yang meningkat, pembukaan lapangan kerja, terpenuhinya kebutuhan dasar, pengurangan angka kemiskinan, dan pemerataan distribusi pendapatan. Kemiskinan seringkali mencerminkan ketidaksetaraan dalam pembangunan dan distribusi sumber daya. Karena itu, mengatasi kemiskinan termasuk kedalam prioritas utama dalam strategi pembangunan. Indikator kemiskinan memainkan peran penting dalam menilai keberhasilan pembangunan.

Sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia menggantungkan hidup pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, tercatat terdapat sekitar 65,4 juta pelaku usaha di sektor ini. UMKM yang beroperasi di tanah air. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, bisa disimpulkan bahwa mayoritas pelaku UMKM berasal dari kalangan masyarakat berpendapatan rendah, karena sektor ini menyerap sekitar 56% tenaga kerja di Indonesia. Pada tahun 2023, diperkirakan sekitar 32 juta penduduk Indonesia menjalankan usaha sendiri tanpa bantuan orang lain, sementara jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 25 juta jiwa. Badan Pusat Statistik (BPS)

mencatat bahwa 46,33% kepala rumah tangga miskin bekerja sebagai wirausaha mandiri atau mempekerjakan buruh tidak tetap maupun buruh tanpa upah. Data ini menunjukkan bahwa usaha mikro dan kecil menjadi sektor yang dominan di kalangan penduduk miskin (BPS, 2023).

UMKM merupakan salah satu merupakan salah satu strategi yang efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Sektor ini memiliki peran penting dalam menyediakan peluang kerja serta meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan (Ikbal et al., 2018). Keberadaan UMKM tidak hanya memberikan lapangan kerja, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu bagian dari UMKM, industri mikro kecil (IMK) memainkan peran krusial dalam pembangunan wilayah. Sektor IMK selain mampu membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah besar, tetapi juga ikut serta berkontribusi yang berarti pada pendapatan regional suatu daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 menjelaskan tentang Perindustrian, industri meliputi proses ekonomi yang mengolah bahan baku menjadi produk atau layanan dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pengembangan industri secara berkelanjutan menjadi aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung tujuan strategis pembangunan nasional. Upaya nyata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat perlu dilakukan melalui berbagai program, salah satunya adalah pengembangan Industri Mikro Kecil (IMK). IMK memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah serta mengurangi kesenjangan pendapatan (BPS, 2014). Seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pemberdayaan usaha mikro dan kecil bertujuan untuk memperkuat kontribusi mereka dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan demikian, IMK menawarkan peluang signifikan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.



Gambar 1. 1 Grafik Pertumbuhan produksi tahunan Y on Y IMK di Indonesia 2013-2022 (unit)

Sumber BPS (data diolah)

Berdasarkan pada data BPS yang tergambar pada Grafik 1.1 diatas, pertumbuhan produksi tahunan IMK mengalami peningkatan hampir setiap tahunnya. Meskipun sempat mengalami penurunan drastis ketika tahun 2020, peristiwa wabah Covid-19 yang terjadi hampir seluruh negara di dunia menjadi penyebab utama berbagai dampak sosial dan ekonomi, sektor IMK berhasil pulih terkhusus beberapa provinsi yang mengalami kenaikan produksi cukup tinggi pada tahun 2021. Dari segi struktur ekonomi Indonesia, IMK merupakan kegiatan yang mendukung produktivitas masyarakat, sehingga menjadi elemen dominan dalam perekonomian nasional. Selain itu, IMK sering dihubungkan dalam persoalan sosial dan ekonomi, seperti persentase tingkat kemiskinan yang tinggi, peningkatan tingkat pengangguran di kelompok masyarakat dengan pendidikan rendah, ketidakmerataan pendapatan masyarakat, dan ketimpangan pembangunan antar daerah. Untuk meningkatkan ekonomi, industri mikro kecil harus dikembangkan. Karena industri mikro kecil memiliki peran cukup besar pada pergerakan ekonomi nasional hal ini dikarenakan karena sebagian besar masyarakat hidupnya bergantung pada industri mikro kecil.

Negara berkembang seperti Indonesia IMK sering menjadi sumber utama lapangan kerja. Menurut Banerjee & Duflo (2019) dalam Arifin & Amri (2024), keberadaan usaha kecil memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. IMK mempunyai peran penting dalam menyediakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan keluarga, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup serta penurunan tingkat kemiskinan. IMK dapat menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan konsumsi dan permintaan domestik. IMK berkontribusi secara signifikan terhadap PDB di Indonesia, IMK berkontribusi lebih dari 60% PDB nasional. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan tetap tinggi meskipun jumlah IMK terus meningkat. Selain itu, terbukti bahwa IMK tidak dapat mengatasi masalah kemiskinan di beberapa daerah.

Jumlah pekerja di sektor IMK akan meningkat signifikan pada tahun 2022, dengan tambahan sekitar 300 ribu pekerja di sektor kecil dan menengah. Sementara angka kemiskinan Indonesia tercatat 9,57% pada September 2022. Angka tersebut meningkat sebesar 0,03 poin persentase dibandingkan Maret 2022, namun turun sebesar 0,14 poin persentase dibandingkan September 2021. Ini mengindikasikan bahwa usaha pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan mulai menunjukkan hasil, meskipun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai target yang lebih rendah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja tahunan pemerintah daerah. Ini ditulis dalam bentuk angka dan ditunjukkan dalam satuan moneter. Sebagai instrumen keuangan yang komprehensif, APBD mencakup seluruh sumber pendapatan dan alokasi pengeluaran untuk mendukung berbagai program dan proyek selama periode anggaran tertentu. Anggaran tersebut disusun untuk mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan potensi dan karakteristik unik setiap daerah. Jika dialokasikan secara efektif, APBD dapat digunakan untuk

membangun infrastruktur strategis seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang berperan penting dalam mendukung kegiatan perekonomian.



Gambar 1. 2 Grafik Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin dan Jumlah Tenaga Kerja Sektor IMK Indonesia tahun 2018-2022 (orang)

Sumber BPS (data diolah)

Penanaman modal di bidang sosial, seperti dalam sektor pendidikan dan kesehatan, berperan penting dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini, pada gilirannya, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang (Saputra, 2024). Ini juga berfungsi sebagai alat utama dalam kebijakan fiskal daerah, yang dirancang untuk mengarahkan alokasi sumber daya guna mendukung proses pembangunan ekonomi. (Hamdani, 2023) dan memperkuat perekonomian di tingkat lokal (Soro et al., 2023).

Masalah investasi, keterbelakangan, dan kemiskinan pada dasarnya adalah masalah pembangunan. Investasi dan kemiskinan menjadi ukuran penting keberhasilan pembangunan suatu negara. negara memiliki tujuan untuk

memaksimalkan investasi untuk mengentaskan kemiskinan guna mencapai pembangunan. Pertumbuhan ekonomi terjadi ketika terdapat ketersediaan dana yang di investasikan. Investasi dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih bermanfaat kepada masyarakat kelas menengah kebawah (Yusuf, 2015) dalam (Pratama, 2019). Kontribusi usaha skala mikro dan kecil sebagai penopang perekonomian juga diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Sektor IMK memiliki kemampuan bertahan yang cukup baik jika dibandingkan dengan usaha berskala besar. Investasi memungkinkan adanya peningkatan produktivitas dan efisiensi melalui adopsi teknologi baru, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan pendapatan usaha dan pekerja industri tersebut. Dengan begitu, investasi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga berkontribusi langsung pada penurunan kemiskinan.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, topik ini masih relevan untuk diteliti. Oleh karena itu, besar keinginan penulis untuk mengkaji topik ini dengan judul penelitian "Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Sektor Industri Mikro Kecil (IMK) dan APBD Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia."

1.2 Perumusan Masalah

Kemiskinan adalah salah satu masalah utama yang dihadapi Indonesia dalam usaha mencapai pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Berbagai faktor mempengaruhi tingkat kemiskinan, termasuk kontribusi tenaga kerja di sektor industri mikro dan kecil (IMK), distribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta peran investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor IMK, yang menjadi pilar utama ekonomi rakyat, memiliki potensi besar untuk menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan APBD mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, investasi berperan sebagai variabel kontrol yang dapat memperkuat hubungan antara tenaga kerja di sektor IMK

dan APBD terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh tenaga kerja sektor IMK dan APBD terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dengan mempertimbangkan investasi sebagai variabel kontrol. Dengan demikian, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Kondisi dan perkembangan jumlah tenaga kerja sektor IMK, pengeluaran APBD, perkembangan investasi dan tingkat kemiskinan di Indonesia?
2. Bagaimana jumlah tenaga kerja sektor IMK dan total pengeluaran APBD yang ada di Indonesia mempengaruhi Tingkat Kemiskinan yang ada di Indonesia dengan investasi sebagai variabel kontrol?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana kondisi dan perkembangan jumlah tenaga kerja sektor IMK, pengeluaran APBD, perkembangan investasi dan tingkat kemiskinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah tenaga kerja sektor IMK dan total pengeluaran APBD terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia dengan investasi sebagai variabel kontrol.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai persyaratan untuk mendapatkan atau menyelesaikan gelar sarjana dalam program studi Ekonomi Pembangunan.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kemiskinan di Indonesia dan menjadi referensi yang berguna bagi pembaca untuk memperluas wawasan mereka tentang isu ini secara umum.

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sumber informasi bagi penelitian lanjutan mengenai kemiskinan di Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun regional.

3. Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi pembuat kebijakan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dengan memberikan informasi dan bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak jumlah tenaga kerja di sektor IMK dan total pengeluaran APBD terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. variabel tenaga kerja sektor IMK diukur dari jumlah tenaga kerja di sektor tersebut menurut provinsi dan variabel total pengeluaran APBD diukur dari total pembiayaan dan belanja daerah menurut provinsi di Indonesia. Selain itu, variabel investasi diwakili oleh angka realisasi penanaman modal dalam negeri per provinsi, dan variabel kemiskinan ditunjukkan dengan persentase penduduk miskin per provinsi. Penelitian ini mencakup 34 provinsi dengan periode waktu dari tahun 2013 hingga 2022.